

KONSEP KEADILAN DALAM KEPEMIMPINAN UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER ABAD KE-21

Nani Yuliani¹, Tiar Anwar Bachtiar²

Magister Pendidikan Agama Islam, IAI Persis Garut

naniy4h@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25-06-26

Disetujui: 09-07-26

Kata Kunci:

*keadilan,
Umar bin Khattab,
kepemimpinan Islam,
pendidikan karakter,
abad ke-21*

Abstract: *This study aims to examine the concept of justice in the leadership of Umar ibn al-Khattab and analyze its relevance to the development of 21st-century character education. The study employed a qualitative approach using library research, drawing upon Islamic historical literature, classical Islamic texts, books, and relevant scholarly journals. The findings reveal that Umar ibn al-Khattab's concept of justice encompasses four principal dimensions: legal justice, social justice, administrative justice, and humanitarian justice. The implementation of these principles is reflected in various policies and actions, including equality before the law, strict supervision of public officials, protection of vulnerable groups, and the fulfillment of citizens' rights regardless of their religion or social status. At the same time, numerous studies indicate that 21st-century learners possess strong digital adaptability but also face significant character-related challenges, such as declining social empathy, low resilience, emotional vulnerability, and an increasing tendency to seek social validation. In this context, the values of justice exemplified by Umar ibn al-Khattab—including integrity, responsibility, social concern, moral courage, and steadfast commitment to ethical principles—are highly relevant as a foundation for character education. The internalization of these values can be achieved through role-model-based learning, reflective practices, habituation, and experiential learning, enabling students not only to understand the concept of justice cognitively but also to internalize and practice it in their daily lives.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan dalam kepemimpinan Umar bin Khattab serta menganalisis relevansinya terhadap pengembangan pendidikan karakter abad ke-21. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari literatur sejarah Islam, kitab klasik, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan Umar bin Khattab mencakup empat dimensi utama, yaitu keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan administratif, dan keadilan kemanusiaan. Implementasi konsep tersebut tampak dalam berbagai kebijakan dan tindakan beliau, seperti persamaan di hadapan hukum, pengawasan terhadap pejabat negara, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta pemenuhan hak-hak warga negara tanpa membedakan agama maupun status sosial. Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik abad ke-21 memiliki kemampuan adaptasi digital yang tinggi, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan karakter seperti menurunnya empati sosial, rendahnya resiliensi, kerentanan emosional, dan kecenderungan mencari validasi sosial. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai keadilan yang dicontohkan Umar bin Khattab, seperti integritas, tanggung jawab, kepedulian sosial, keberanian moral, dan keteguhan dalam memegang prinsip, memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan landasan pendidikan karakter. Internalisasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis keteladanan, refleksi, pembiasaan, dan pengalaman langsung sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep keadilan secara kognitif, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter menjadi salah satu isu penting dalam pendidikan abad ke-21 seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi yang

membawa berbagai tantangan moral dan sosial (Suherman et al., 2026). Fenomena seperti menurunnya integritas, meningkatnya intoleransi, perundungan (bullying), korupsi, ketidakadilan, dan rendahnya kepedulian sosial menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga harus membentuk karakter peserta didik. Dalam konteks ini, nilai keadilan memiliki peran yang sangat penting karena mampu membentuk sikap objektif, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta mencegah perilaku diskriminatif dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, berbagai realitas sosial menunjukkan bahwa nilai keadilan masih sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan model pendidikan yang menghadirkan keteladanan nyata untuk menanamkan nilai tersebut kepada peserta didik.

Salah satu sumber keteladanan penting dalam pendidikan Islam adalah kepemimpinan Umar bin Khattab yang dikenal berhasil menerapkan prinsip keadilan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Keadilan yang ditegakkannya tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan Umar menunjukkan komitmennya terhadap keadilan, seperti melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi masyarakat, melindungi kelompok lemah, serta menindak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan tanpa membedakan status sosial maupun kedekatan keluarga. Sikap objektif, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang ditunjukkannya menjadikan Umar bin Khattab sebagai figur teladan yang relevan untuk dijadikan sumber nilai dalam pengembangan pendidikan karakter pada era modern.

Pada abad ke-21, peserta didik dituntut tidak hanya memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, tetapi juga karakter yang kuat agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan global. Pendidikan karakter yang berorientasi pada keteladanan historis dapat menjadi salah satu pendekatan efektif dalam membentuk kepribadian peserta didik. Melalui pengkajian terhadap konsep keadilan Umar bin Khattab, peserta didik dapat memahami bahwa keadilan bukan sekadar konsep teoritis, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap jujur, amanah, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan berani membela kebenaran. Dengan demikian, sejarah Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan masa lalu, tetapi juga sebagai sumber nilai yang relevan bagi pembentukan karakter generasi masa kini (Abu Yusuf, 1979, hlm. 136–137; At-Tabari, 1987, jil. 4, hlm. 205)..

Penelitian mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab telah banyak dilakukan, baik dari perspektif sejarah, politik, maupun administrasi pemerintahan. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan konsep keadilan Umar bin Khattab dengan kebutuhan pendidikan karakter abad ke-21 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam kepemimpinan Umar bin Khattab serta menganalisis relevansinya terhadap penguatan pendidikan karakter pada era kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis

dalam pengembangan pendidikan Islam sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam membangun generasi yang berakarakter adil, bertanggung jawab, dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep keadilan dalam kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan sumber-sumber sejarah dan literatur Islam serta menganalisis relevansinya terhadap pendidikan karakter abad ke-21.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, nilai, dan konsep yang terkandung dalam praktik kepemimpinan Umar bin Khattab secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengukuran statistik, melainkan menafsirkan data secara deskriptif dan analitis berdasarkan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Dalam Kepemimpinan Umar Bin Khattab

Makna Adil

Kata adil berasal dari bahasa Arab العدل (al-'adl) yang berakar dari huruf 'ain (ع), dal (د), dan lam (ل). Secara bahasa, kata ini memiliki makna keseimbangan, kesetaraan, kelurusan, tidak memihak, serta menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dalam literatur bahasa Arab klasik, al-'adl juga berarti memberikan hak kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu secara proporsional.

Menurut Ibnu Manzur dalam Lisan al-'Arab, kata al-'adl digunakan untuk menunjukkan makna lawan dari kezaliman (al-jawr), yaitu sikap lurus, seimbang, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya dan memberikan hak kepada pemiliknya secara tepat (Ibnu Manzur, 1994, jil. 11, hlm. 430–432).

Sementara itu, Ar-Raghib al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an menjelaskan bahwa al-'adl adalah sikap pertengahan yang terhindar dari dua bentuk ekstrem, yaitu berlebihan dan mengurangi hak (Ar-Raghib al-Asfahani, 2009, hlm. 551–552).

Al-Ghazali mendefinisikan keadilan sebagai keadaan yang menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya dan memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional. Keadilan tercapai apabila seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada kebenaran dan kebijaksanaan, bukan kepentingan pribadi (Al-Ghazali, t.t., jil. 3, hlm. 58–60).

Ibnu Taimiyah memandang keadilan sebagai prinsip universal yang menjadi dasar tegaknya kehidupan masyarakat dan negara. Menurutnya, Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun dipimpin oleh orang yang tidak sempurna agamanya, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun mengatasnamakan agama (Ibnu Taimiyah, 1995, jil. 28, hlm. 146–147).

Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan keadilan sebagai pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya serta penempatan kewajiban secara proporsional. Keadilan bukan berarti menyamakan semua orang dalam segala hal, melainkan memperlakukan mereka sesuai kondisi dan hak yang dimilikinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, adil (al-'adl) merupakan salah satu nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, melaksanakan kewajiban secara proporsional, serta memutuskan perkara berdasarkan kebenaran tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu, kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, maupun tekanan kelompok. Keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, sosial, ekonomi, dan politik.

Krisis Keadilan yang Melanda Indoneda dan Dunia

Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam pembangunan demokrasi dan hukum. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan keadilan di berbagai bidang antara lain:

1. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan
2. Ketimpangan akses terhadap keadilan

Meskipun setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, namun terjadi fenomena yang sering menjadi sorotan publik antara lain: lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya bantuan hukum bagi masyarakat miskin, serta perbedaan kualitas pendampingan hukum antara kelompok kaya dan miskin.

3. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas

Beberapa lembaga internasional juga menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dalam tata kelola publik Indonesia. Isu mengenai keterbukaan informasi, akuntabilitas pengelolaan sumber daya, dan pengawasan terhadap kekuasaan masih menjadi perhatian berbagai pihak.

4. Kesenjangan sosial dan ekonomi

Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga distribusi kesejahteraan. Ketimpangan pendapatan, perbedaan kualitas pendidikan, serta akses layanan kesehatan yang belum merata menunjukkan bahwa keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.

Krisis Keadilan di Tingkat Global (Dunia)

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kualitas keadilan adalah Rule of Law Index yang diterbitkan oleh World Justice Project. Laporan tahun 2024 menunjukkan bahwa dunia mengalami penurunan kualitas negara hukum (rule of law) selama tujuh tahun berturut-turut. Sebanyak 57% negara yang disurvei mengalami kemunduran dalam aspek keadilan, hak-hak dasar warga negara, dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Bahkan lebih dari enam miliar penduduk dunia kini hidup di negara yang kualitas penegakan hukumnya lebih lemah dibandingkan tahun 2016 (World Justice Project, 2024).

Menurut laporan tersebut, kemunduran paling banyak terjadi pada:

- Perlindungan hak asasi manusia.
- Pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah.
- Independensi lembaga hukum.
- Kebebasan masyarakat sipil dan media

Konsep Keadilan Umar

Konsep keadilan dalam kepemimpinan Umar bin Khattab merupakan salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Bagi Umar, keadilan tidak hanya berarti penegakan hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga hak-hak rakyat, menegakkan kebenaran, serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu tanpa membedakan status sosial, kekayaan, maupun kedekatan dengan penguasa.

Prinsip ini tampak dalam penerapan persamaan di hadapan hukum. Umar tidak memberikan keistimewaan kepada pejabat atau keluarganya, sebagaimana terlihat dalam kasus putra Amr bin al-Ash yang dihukum setelah berbuat zalim kepada seorang pemuda Mesir. Selain itu, Umar juga menerapkan keadilan sosial melalui kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat. Ketika menemukan keluarga yang kelaparan, ia secara langsung

membawa bantuan dari Baitul Mal sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Keadilan Umar juga tercermin dalam pengawasan yang ketat terhadap para pejabat negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta dalam perlakuannya yang adil terhadap seluruh warga negara, termasuk non-Muslim. Perlindungan terhadap hak-hak mereka menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, konsep keadilan Umar bin Khattab mencakup empat dimensi utama, yaitu keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan administratif, dan keadilan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut menjadikan kepemimpinannya sebagai teladan yang relevan bagi pengembangan pendidikan karakter dan kepemimpinan pada era modern.

Pentingnya Peserta Didik Memahami Dan Menghayati Nilai Keadilan.

Memahami dan menghayati nilai keadilan sangat penting bagi peserta didik karena keadilan merupakan landasan terbentuknya karakter yang jujur, bertanggung jawab, menghargai hak orang lain, serta mampu mengambil keputusan secara objektif. Peserta didik yang memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan cenderung mampu bersikap sportif, tidak diskriminatif, menghormati perbedaan, dan menjalin hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nilai keadilan juga menjadi dasar dalam membangun integritas dan kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan pada abad ke-21.

Dalam perspektif pendidikan Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi juga harus diinternalisasikan menjadi sikap dan perilaku. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibimbing untuk memahami bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati serta bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip kebenaran dan kemaslahatan bersama. Melalui pemahaman dan penghayatan nilai keadilan, peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter yang baik harus mengembangkan tiga aspek, yaitu moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (penghayatan moral), dan moral action (perilaku moral). Dengan demikian, nilai keadilan tidak cukup hanya diketahui, tetapi juga harus dirasakan dan diwujudkan dalam tindakan nyata (Lickona, 1991, hlm. 51–63).

Implementasi Konsep Keadilan Umar Bin Khattab Dalam Kehidupan Sosial Dan Pemerintahan Pada Masanya

Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin yang memiliki peran signifikan bagi pengembangan dakwah Islam. Ia memikul amanah sebagai Khulafaur Rasyidin selama 10 tahun (13 – 23 H) menggantikan Khalifah Abu Bakar, dengan kontribusi penting berupa ekspansi dakwah Islam ke luar Arabia serta perintisan sistem ketatanagaraan Daulah Islam. Signifikansi peran Umar bahkan diadaptasikan ke dalam seni film abad ke-21 melalui serial *Omar* (2013) yang pernah tayang di stasiun televisi Indonesia selama bulan Ramadan.

Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah Saw, di samping Abu Bakar. Pada beberapa riwayat, Rasulullah Saw. merasa senang ketika bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Pengalaman kebersamaan Rasulullah Saw selama memperjuangkan risalah Islam, mengokohkan kepribadian Umar, sehingga ia dijuluki dengan gelar *Al-Faruq* yang berarti pembeda antara yang haq dan bathil.

Kepribadian Umar bin Khattab

Kepribadian Umar bin Khattab baik sebelum maupun sesudah masuk Islam dikenal tegas dan cenderung keras. Ia pernah menjadi salah seorang yang paling keras permusuhan terhadap Rasulullah Saw dan Kaum Muslimin ketika mereka sedang berdakwah di Makkah. Umar sempat menjadi sosok algojo penyiksa yang amat ditakuti oleh Kaum Muslimin di kota tersebut. Bahkan, ia nyaris membunuh Rasulullah Saw, akan tetapi justru peristiwa itulah yang menjadi tonggak perubahan dalam hidup Umar. Alih-alih melenyapkan nyawa utusan Allah Swt, Umar justru terpicu dengan ajaran yang dibawanya sampai akhirnya memutuskan masuk Islam di hadapan Rasulullah Saw.

Masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan Kaum Muslimin menjadi jawaban atas doa Rasulullah Saw. Suatu ketika, beliau pernah memanjatkan doa supaya Allah Swt menghendaki hidayah kepada salah satu dari dua sosok pemuka Quraisy yakni Amr bin Hisyam atau Abu Jahal atau Umar (Al-Mubarakfuri, 2001, hlm. 134). Kaum Muslimin juga makin teguh semangatnya setelah Umar masuk Islam karena setelah peristiwa tersebut Rasulullah Saw bersama pengikutnya mulai meninggalkan strategi dakwah tersembunyi (*sirriyyah*) menuju dakwah terang-terangan (*jahriyyah*). Watak keras Umar alhasil tertuju bukan lagi kepada Kaum Muslimin, melainkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa masuknya Umar ke dalam agama Islam membuat para pemuka Quraisy makin memperhitungkan kekuatan Kaum Muslimin.

Umar bin Khattab dengan perangai tegas dan kerasnya memperkaya keanekaragaman tabiat sahabat Rasulullah Saw. Kehadirannya di sisi Rasulullah Saw melengkapi sifat lembutnya Abu Bakar. Umar menjadi sahabat yang terdepan menghadapi keangkuhan musuh-musuh Islam. Ia tidak pernah gentar menghadapi orang yang mengancam keselamatan jiwa dan raga Rasulullah Saw. Watak semacam ini sesungguhnya menjadi modal penting bagi karakteristik kepemimpinan Umar setelah didaulat menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua.

Keadilan Administratif

Khalifah Umar bin Khattab memikul amanah sebagai Khulafaur Rasyidin kedua melalui mekanisme penunjukkan langsung oleh Khalifah Abu Bakar setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Ia mengawali masa jabatannya dengan tantangan berupa ekspedisi *fitnah* Kaum Muslimin menuju wilayah kekuasaan Romawi dan Persia. Di tengah masa sulit inilah sampai seterusnya tampak integritas kepemimpinan Khalifah Umar.

Bagi pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab, keadilan dipandang sebagai tanggung jawab moral dan spiritual seorang pemimpin dalam menjaga hak-hak rakyat, menegakkan kebenaran, serta memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, kekayaan, suku, maupun kedekatan dengan penguasa. Kebijakan paling awal yang diberlakukan Khalifah Umar setelah memikul amanah ialah mencopot Khalid bin Walid sebagai panglima angkatan perang Kaum Muslimin, lantas menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah.

Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan ini lantaran mendapatkan laporan mengenai keputusan keliru yang diambil Khalid bin Walid mengenai pemborosan *ghanimah* setelah menaklukkan Syam (Ibnu Katsir, 2012, hlm. 251–252).. Keadaan Kaum Muslimin sendiri saat itu sedang larut dalam euforia berlebihan. Mereka merasa Khalid selalu membawa pasukan Kaum Muslimin meraih kemenangan, sementara Khalifah Umar berkeyakinan bahwa kemenangan Kaum Muslimin merupakan berkat dari pertolongan Allah Swt.

Kebijakan pencopotan Khalid bin Walid menjadi sebuah preseden kebijakan yang baik untuk menghentikan gejala *abuse of power*. Khalifah Umar berusaha bersikap adil dengan tidak menutup mata atas kekeliruan yang dilakukan sahabatnya meski dirinya pernah meraih prestasi membanggakan. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Khalid bin Walid sempat dihukum dengan cara diikat oleh Abu Ubaidah dengan sorbannya sendiri. Khalid segera menghadap Khalifah Umar untuk dimintai pertanggungjawabannya. Di sebuah surat mengenai kebijakan tersebut, Khalifah Umar menyatakan:

“Sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid disebabkan murka atau ia berkhianat, tetapi disebabkan orang-orang begitu banyak menyanjungnya dan terfitnah (kehebatan) dirinya, maka aku ingin memberitahukan bahwa Allah-lah yang kuasa berbuat. Agar mereka tidak terfitnah” (Ibnu Katsir, 2012, hlm. 253).

Keadilan Hukum dan Kemanusiaan

Perluasan dakwah Islam dilancarkan secara intensif dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tak lama setelah penaklukan kawasan Syam dan Baitul Maqdis, ia mengutus Amr bin Ash bersama beberapa sahabat lainnya seperti Zubair bin Awwam untuk meneruskan fathat hingga Mesir. Peristiwa ini terjadi pada sekitar Rabiul Awwal 16 H. Amr berhasil menaklukan Mesir serta memberikan jaminan keamanan untuk penduduk negeri tersebut, karena itu Amr ditunjuk oleh Khalifah Umar menjadi Gubernur Mesir.

Amr bin Ash sebagai pemangku kebijakan Daulah Islamiyah di Mesir pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkannya dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kesalahan ini menyeret anak Amr bin Ash, yakni Abdullah bin Amr bin Ash yang terlibat persengketaan dengan seorang penduduk asli Mesir dari bangsa Qibti (Koptik). Orang Qibti yang bukan Muslim mengadukan persoalan tersebut langsung kepada Khalifah Umar. Karena itu, Amr bin Ash dan Abdullah bin Amr bin Ash diminta menghadap kepadanya. Khalifah Umar memberikan kesempatan kepada penduduk Qibti tersebut untuk membalas perilaku putra Amr bin Ash. Pada kesempatan itu, ia meluapkan ekspresi kekecewaan dalam bentuk pertanyaan menohok kepada Amr bin Ash sebagai pejabat tinggi Daulah Islam, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?" (Zainal Abidin Ahmad, 2001).

Sikap yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab mencerminkan sifat kepemimpinannya yang menjunjung tinggi keadilan universal. Ia sama sekali tidak mengistimewakan golongan pejabat dengan rakyat biasa. Khalifah Umar meskipun dikenal sebagai Amirul Mukminin, tidak membela kedudukan Amr bin Ash beserta anaknya yang berasal dari kalangan sahabat Rasulullah Saw. Kebijakan yang ditampakkan oleh Khalifah Umar tersebut bersifat anti-diskriminasi. Meskipun, penduduk Qibti itu bukan berasal dari bangsa Arab dan bukan pula beragama Islam, namun Khalifah Umar tetap berusaha menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Ia menetapkan persamaan kedudukan bagi setiap orang di depan hukum.

Keadilan Sosial

Khalifah Umar bin Khattab bersama dengan Aslam maula Umar pernah bertolak menuju Dusun Waqim. Mereka melihat seorang perempuan dan anak-anaknya yang sedang menangis karena kelaparan. Khalifah Umar menanyakan tentang keadaan perempuan bersama para buah hatinya itu. Perempuan tersebut tidak mengetahui dirinya sedang bercakap dengan pemimpinnya. Mendengar kecaman perempuan tersebut pada Umar, membuatnya segera pulang menuju gudang penyimpanan gandum (Ibnu Katsir, 2012, hlm. 228)..

Amirul Mukminin, sambil menangis mengeluarkan sekarung gandum disertai minyak samin. Khalifah Umar meminta asistennya, Aslam untuk menaikkan karung gandum ke pundaknya. Aslam yang merasa tak tega awalnya menolak, akan tetapi sang khalifah mengatakan padanya, "Apakah engkau bisa memikul dosaku kelak di Hari Kiamat?" (Hamka, 2016, hlm. 162; Ibnu Katsir, 2012, hlm. 229). Lalu, keduanya kembali kepada

perempuan sebelumnya dan ikut membantu memasak untuk perempuan dan anak-anaknya. Khalifah Umar membersamai mereka sampai anak-anak tertidur pulas.

Peristiwa serupa terjadi manakala Hijaz dilanda paceklik akibat kemarau panjang pada sekitar 18 H. Banyak penduduk yang mengungsi menuju ibukota Daulah Islam, Madinah. Mereka tidak mempunyai bahan makanan dan melaporkan hal ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sejak itu, ia membagi-bagikan makanan dan uang dari gudang penyimpanan serta Baitul Mal sampai perbendaharaan negara kosong.

Khalifah Umar bin Khattab menyikapi perbendaharaan yang habis total lantaran paceklik panjang dengan menjalankan pola hidup sederhana (*frugal living*) secara ekstrem. Ia tidak lagi memakan lemak susu atau makanan yang menggempukkan selama 9 bulan. Khalifah Umar hanya mengisap-isap minyak dan cuka, karena itu dirinya tidak pernah merasa kenyang. Keadaan memprihatinkan ini menyebabkan warna kulit sang khalifah berubah menjadi hitam dan tubuhnya mengurus.

Peristiwa yang menggambarkan relasi intens antara Khalifah Umar bin Khattab dengan rakyat kecil menjadi manifestasi keadilan yang berorientasi kesejahteraan sosial. Terlukis dengan jelas bahwa sifat adil Khalifah Umar berasal dari tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin Kaum Muslimin. Ia merasa harus memastikan bahwa rakyatnya tidak mengalami kesulitan. Manifestasi adil saat itu ialah dengan mengedapankan empati seraya mengusahakan agar kebutuhan rakyat terpenuhi.

Relevansi Konsep Keadulan Umar Bin Khattab Terhadap Pengembangan Pendidikan Karakter Abad Ke-21

Berdasarkan berbagai penelitian mutakhir, karakter anak-anak abad ke-21 (khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha yang saat ini menjadi peserta didik) menunjukkan dua kecenderungan sekaligus: memiliki banyak potensi positif, tetapi juga menghadapi tantangan karakter yang cukup serius.

Karakter Positif

Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik abad ke-21 umumnya memiliki:

1. Kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap teknologi digital.
2. Keterbukaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan pandangan.
3. Keberanian menyampaikan pendapat.
4. Kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia.
5. Kemampuan memperoleh informasi secara cepat melalui media digital.
6. Minat yang kuat terhadap pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif.

Karakter ini membuat mereka relatif lebih kreatif, fleksibel, dan mudah menerima perubahan dibandingkan generasi sebelumnya.

Karakter Negatif/Krisis Karakter

Namun berbagai penelitian juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan karakter yang perlu mendapat perhatian pendidikan.

1. Menurunnya Empati Sosial

Penelitian tentang digital empathy gap pada Generasi Z di Indonesia menemukan bahwa intensitas interaksi digital yang tinggi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya sensitivitas sosial dan emosional. Banyak remaja aktif berinteraksi di media sosial, tetapi kurang berkembang dalam kemampuan memahami perasaan orang lain secara mendalam

2. Kerentanan Emosional dan Mental (Tidore, Widiarto, & Zulaikha, 2026, hlm. 74–89).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z lebih rentan mengalami kecemasan, stres, kesepian, dan masalah kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah tekanan sosial yang muncul dari media digital, budaya perbandingan sosial (social comparison), dan tuntutan pencapaian yang tinggi (Marisalia, Reza, & Fitriani, 2024, hlm. 1–10)..

3. Menurunnya Ketahanan Diri (Resiliensi)

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian peserta didik mengalami kesulitan menghadapi kegagalan, kritik, dan tekanan. Mereka cenderung lebih mudah mengalami stres ketika menghadapi tantangan akademik maupun sosial dibandingkan generasi yang tumbuh dalam lingkungan dengan tingkat paparan digital yang lebih rendah (OECD, 2024, hlm. 15–28)..

4. Kecenderungan Mencari Validasi Sosial

Penelitian mengenai fenomena digital validation menunjukkan bahwa sebagian Generasi Z sangat dipengaruhi oleh jumlah likes, komentar, dan pengakuan di media sosial. Penghargaan diri sering kali dikaitkan dengan respons publik terhadap identitas digital yang mereka tampilkan (Putri, Rizbiyanti, & Tresnawaty, 2025).

5. Literasi Digital Tinggi, tetapi Belum Selalu Diikuti Kedewasaan Moral

Anak abad ke-21 umumnya sangat mahir menggunakan teknologi, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kemampuan teknis digital tidak selalu diiringi dengan etika digital, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam menggunakan informasi.

Dengan karakter-karakter tersebut, praktik keadilan Umar bin Khattab memiliki relevansi yang kuat sebagai sumber nilai pendidikan karakter. Umar tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga memiliki empati yang tinggi terhadap rakyatnya. Ketika beliau memikul sendiri gandum untuk membantu

keluarga yang kelaparan, Umar menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan melalui aturan, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama (Ibnu Sa'd, t.t., jil. 3, hlm. 277–278). Nilai ini penting untuk menumbuhkan empati di tengah kehidupan digital yang cenderung mengurangi sensitivitas sosial.

Selain itu, keteguhan Umar dalam menjalankan amanah dapat menjadi teladan bagi peserta didik yang mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Umar tetap teguh memimpin umat di tengah berbagai persoalan besar, seperti pemberontakan, perluasan wilayah Islam, dan pengelolaan pemerintahan yang kompleks. Sikap tersebut mencerminkan nilai ketangguhan (*resilience*), keberanian moral, dan integritas yang sangat dibutuhkan oleh generasi masa kini.

Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan Umar bin Khattab seperti empati, integritas, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan keteguhan dalam memegang prinsip sangat relevan untuk membentuk karakter peserta didik abad ke-21. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya menjadi generasi yang kreatif dan inovatif, tetapi juga memiliki kematangan moral dalam menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan bersama.

Agar nilai keadilan Umar bin Khattab tidak hanya diketahui (*knowing*), tetapi juga dihayati (*feeling*) dan akhirnya diamalkan (*acting*) oleh peserta didik, pembelajaran harus melampaui penyampaian fakta sejarah. Dalam teori pendidikan karakter, proses internalisasi nilai berlangsung melalui tiga tahap: *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* (Lickona, 1991, hlm. 51–63). Oleh karena itu, pembelajaran tentang Umar harus dirancang agar siswa tidak hanya menghafal peristiwa, tetapi juga merasakan makna dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Maka gambaran urutan model pembelajaran yang sesuai tahapan teori Pendidikan karakter adalah sebagai berikut:

1. Mulai dari kisah yang menyentuh emosi (Story based Learning)

Cara yang paling efektif adalah menyajikan kisah-kisah keadilan Umar yang dekat dengan kehidupan peserta didik, namun Guru tidak langsung menjelaskan nilai moralnya, tetapi mengajak siswa membayangkan situasi tersebut diantaranya melalui pertanyaan reflektif seperti “Apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu mengalami hal itu atau kalau kamu jadi Umar?”

2. Hubungkan dengan realitas kehidupan siswa

Setelah menyampaikan kisahnya, lalu sampaikan satu situasi berkaitan dengan ketidakadilan yang sering dialami siswa, misalnya grup pertemanan yang hanya berisi orang-orang tertentu, bullying terhadap teman dan lain-lain, lalu tanyakan apa pendapat mereka tentang hal itu dan kira-kira bagaimana Umar akan menyelesaikan masalah itu.

3. Gunakan metode reflektif

Agar lebih dipahami dan dijiwai, berikan siswa tugas menuliskan satu peristiwa dalam hidupnya ketika dia merasa diperlakukan tidak adil. Bagaimana seharusnya masalah tersebut diselesaikan jika meneladani Umar bin Khattab?

4. Terapkan role playing (bermain peran)

Usahakan juga dalam pembelajaran anak suruh memerankan kisah yang telah disampaikan dan setelahnya diskusikan pengalamannya.

5. Lakukan pembiasaan

Sebuah karakter atau akhlak akan tertanam apabila dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Maka buatlah program pembiasaan diluar jam Pelajaran misal dalam jangka satu minggu atau satu bulan khusus membiasakan bersikap adil. Beri tugas yang jelas kepada anak contoh: minggu ini kamu harus membantu teman yang kesulitan belajar, atau menjadi mediator bila ada teman yang konflik, dan lain-lain.

6. Kuatkan dengan keteladanan guru

Dalam pendidikan Islam, metode yang paling kuat adalah uswah hasanah (keteladanan). Sulit mengajarkan keadilan Umar jika guru sendiri memperlakukan siswa secara berbeda-beda, pilih kasih, atau tidak konsisten dalam menerapkan aturan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis konseptual yang ekstensif, artikel ini menyimpulkan bahwa penetrasi konten Islami di platform YouTube memberikan dampak ganda yang paradoksial terhadap pembelajaran agama pelajar. Secara kognitif, YouTube memfasilitasi peningkatan pemahaman materi keagamaan melalui mekanisme pemrosesan informasi ganda (*dual coding*), di mana abstraksi keagamaan diterjemahkan menjadi visualisasi yang dinamis sehingga aksesibilitas dan motivasi belajar meningkat drastis. Namun di sisi lain, fenomena ini melahirkan krisis epistemologis struktural. Ketidadaan filter literasi yang memadai menyebabkan pelajar rentan mengalami fragmentasi pemahaman akibat tren mikro-video yang tercerabut dari konteks keilmuannya. Lebih jauh, algoritma digital memicu pergeseran sentra otoritas dari ulama tradisional yang bersanad, menjadi kreator konten yang populer semata, yang pada gilirannya dapat mereduksi keluhuran dan sakralitas agama menjadi komoditas populis.

Mengacu pada tantangan tersebut, sintesis antara epistemologi pendidikan Islam klasik dengan literasi digital modern adalah sebuah keharusan mutlak. Lembaga pendidikan, guru PAI, dan pembuat kebijakan dituntut untuk mengimplementasikan literasi media yang tidak sekadar teknis, melainkan kritis dan sarat nilai (*value-laden*). Konsep validasi *sanad* harus dimodernisasi menjadi keterampilan memverifikasi rekam jejak digital penceramah,

sementara etika pencarian ilmu (*adab*) dan pembinaan karakter (*tarbiyah*) harus direvitalisasi melalui pendekatan *blended learning*. Ke depannya, direkomendasikan adanya riset-riset pengembangan yang merumuskan instrumen evaluasi literasi digital spesifik untuk konten keagamaan, guna memastikan generasi *Digital Ummah* tetap adaptif terhadap teknologi tanpa harus kehilangan akar autentisitas keislaman mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Yusuf. (1979). *Kitab al-kharaj*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Asfahani, A.-R. (2009). *Al-mufradat fi gharib al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' 'ulum al-din* (Vol. 3). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Mubarakfuri, S. R. (2001). *Sirah Nabawiyah: Perjalanan hidup Rasul yang agung*. Darul Haq.
- At-Tabari. (1987). *Tarikh al-rusul wa al-muluk* (Vol. 4). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hamka. (2016). *Sejarah umat Islam*. Gema Insani.
- Ibnu Katsir. (2012). *Perjalanan hidup empat khalifah Rasul yang agung* (A. I. Al-Atsari, Penerj.). Darul Haq.
- Ibnu Manzur. (1994). *Lisan al-'Arab* (Vol. 11). Dar Sadir.
- Ibnu Sa'd. (n.d.). *At-tabaqat al-kubra* (Vol. 3). Dar Sadir.
- Ibnu Taimiyah. (1995). *Majmu' al-fatawa* (Vol. 28). Muja'mma' al-Malik Fahd.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Marisalia., Reza, F. A., & Fitriani, A. (2024). Sulit mengungkapkan emosi: Kecerdasan emosi dan attachment style dengan alexithymia pada Generasi Z. *Psikologi Prima*, 7(1), 1–10.
- OECD. (2024). *Social and emotional skills for better lives: Findings from the OECD survey on social and emotional skills 2023*. OECD Publishing.
- Putri, A. P., Rizbiyanti, D. R., & Tresnawaty, B. (2025). Fenomena validasi digital: Analisis korelasi antara keterlibatan media sosial dan tendensi narcissistic personality pada Generasi Z. *JIVA Journal of Behavior and Mental Health*, 6(1).
- Suherman, A. M., Arifudin, Y. F., Md Shaarani, S., Nirmala, I., Saenong, F. F., Kholifah, A., Mohd Fakhrudin bin Abd. Mukti, Wahidin, Darmiyanti, A., Aisyah, D. S., Azis, A., Wahid, M., Khulasoh, S., Rukajat, A., Lesmana, D., Hasanah, N., Fairus, S. N., Akil, Hakim, A., ... Putri, F. E. (2026). *The Qur'an and Sunnah in the digital era: Ethical, educational and civilization perspectives*. Rumah Literasi Publishing.
- Tidore, J. N., Widiarto, D. S., & Zulaikha. (2026). Literasi digital dan digital empathy gap: Analisis kemampuan empatik pengguna media sosial di kalangan Generasi Z. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 5(1), 74–89.
- World Justice Project. (2024). *Rule of Law Index 2024*. World Justice Project.
- Zainal Abidin Ahmad. (2001). *Membangun negara Islam*. Iqra.